

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt)

Oleh

Tamara Febriyani

Peredaran narkotika melibatkan anak dibawah umur. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia Anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Namun mengingat usianya yang masih tergolong sebagai anak-anak, proses hukum diterapkan secara khusus dengan merujuk pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai pengedar narkotika dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt, Apakah pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan fakta dipersidangan serta sejalan dengan tujuan pemidanaan rerhadap anak.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian dapat diketahui Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt terdiri atas pertimbangan yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis yaitu pidana penjara bukan semata-mata sebagai kurungan badan, tetapi lebih berorientasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana.

Tamara Febriyani

Pertimbangan sosiologis yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Lalu Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkoba dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus- Anak/2023/PN.Gdt telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu adanya keterangan para saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya. Hakim Anak berdasarkan fakta-fakta persidangan memperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak dan sejalan dengan prinsip pemidanaan terhadap anak yang diatur dalam UUSPPA, hakim juga mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan perlindungan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani perkara anak diharapkan secara konsisten memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pemberlakuan sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. diharapkan hakim anak di Indonesia dalam memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan dalam putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pidana Penjara, Anak, Pengedar Narkoba

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIS OF JUDGES' CONSIDERATION IN IMPOSING IMPRISONMENT ON CHILDREN AS NARCOTICS DEALERS

(Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/ PN.Gdt)

By

Tamara Febriyani

The circulation of narcotics involves minors. Under the positive law in force in Indonesia, children who commit criminal acts must be held accountable before the law. However, considering their status as minors, the legal process is applied in a special manner by referring to the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). This also applies to children involved in narcotics distribution. The main issue in this study is: what are the legal considerations of judges in imposing imprisonment on children as narcotics dealers in Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt? Furthermore, whether the sentence imposed by the judge is in accordance with the facts revealed in court and aligned with the objectives of punishment for children.

The research approach used is normative juridical and empirical juridical. The data used in this study are primary and secondary data, with data collection carried out through literature study and field study. The resource persons in this study were Judges at the Gedong Tataan District Court, Prosecutors at the Pesawaran District Prosecutor's Office, and Lecturers of the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. The data analysis method applied is qualitative analysis.

The results of the study show that the legal basis of the judge's consideration in sentencing imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months in the Special Development Institution for Children (LPKA) and 3 (three) months of job training in the Social Welfare Organizing Institution (LPKS) against a child as the perpetrator of narcotics abuse in Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt consists of juridical considerations, namely the fulfillment of elements under Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law as charged by the Public Prosecutor. The philosophical consideration is that imprisonment is not merely about physical confinement but is more oriented toward efforts to improve the child's behavior so that he becomes a better person after serving his sentence.

Tamara Febriyani

The sociological consideration is that the judge weighed both mitigating and aggravating circumstances in sentencing the child as the perpetrator of the crime. The punishment imposed by the judge on the child as a narcotics dealer in Decision Number: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Gdt is consistent with the facts revealed in court, including the testimonies of witnesses that corroborated each other and the defendant's own confession. Based on the facts of the trial, the Juvenile Judge found evidence that a narcotics distribution crime had been committed by the child. In line with the principles of juvenile sentencing regulated in the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), the judge also considered the balance between legal interests and the protection of the child as an individual still in the developmental stage.

The recommendation in this study is that judges handling juvenile cases are expected to consistently adjudicate such cases with an orientation toward realizing child protection, one of which is through job training in the Social Welfare Organizing Institution (LPKS). The implementation of the juvenile justice system takes into account that children are the nation's next generation who should be able to grow and develop properly according to their age, under the care and protection of parents, society, and the state. It is expected that juvenile judges in Indonesia, in deciding cases involving children, will continue to refer to the provisions stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Law, so that children in conflict with the law can still be provided with guidance within the punishment imposed by the judge.

Keywords : Judge's Decision, Imprisonment, Child, Narcotics Dealer